



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN
INFRASTRUKTUR JALAN UMUM TERHADAP PERUSAHAAN
TAMBANG MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI JAMBI**

TESIS

**Disusun untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

**NOVY EKACITRA
NIM: P2B123068**

**UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**JAMBI
2025**



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Novy Ekacitra
Nomor Induk Mahasiswa : P2B123068
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pemanfaatan Infrastruktur Jalan Umum Terhadap
Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara Di
Provinsi Jambi

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, Maret 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.
NIP.195503231984031001

Dr. Raden Sarwani, S.H., M.PA
NIP. 196712101996021003



UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Novy Ekacitra
Nomor Induk Mahasiswa : P2B123068
Program Kekhususan : Hukum Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam
Pemanfaatan Infrastruktur Jalan Umum Terhadap
Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara Di
Provinsi Jambi

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tesis pada Program
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi
Pada tanggal 24 Maret 2025
Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.	Sekretaris	
Dr. Hartati, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Raden Sarwani, S.H., M.PA	Anggota	

Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum

Mengesahkan:
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP.196405031990031004

Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H.
NIP. 196507011990031002

PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : Novy Ekacitra

NIM : P2B123068

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan atau pendapat saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping/Pembantu;
3. Dalam Tesis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam penulisan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi ini.

Jambi, Mare7 2025

Yang Membuat Pernyataan,

**Novy Ekacitra
NIM P2B123068**

ABSTRAK

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh cukup ramai pemberitaan di berbagai media sosial terkait kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga menimbulkan korban jiwa, hal ini diakibatkan oleh beban lalu lintas harian jalan umum yang meningkat. Dari permasalahan tersebut, telah menyita perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu kemacetan di jalan raya, kerusakan jalan umum dan perlunya jalan khusus angkutan batubara. Seharusnya angkutan batubara memang melalui jalan khusus bukan jalan nasional. Namun, di Jambi hingga saat ini belum memiliki jalan khusus tersebut. Sehingga angkutan truk batu bara masih menggunakan jalan umum. Atas dasar latarbelakang tersebut, perlunya diteliti tentang (a) Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur kewajiban perusahaan tambang batu bara terkait infrastruktur jalan umum dan jalan khusus di Provinsi Jambi, (b) Kebijakan Pemerintah Daerah dan akibat hukum dalam memanfaatkan jalan umum dan khusus terkait transportasi tambang mineral dan batu bara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bahwa norma-norma yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam, khususnya tambang mineral dan batubara, maka hasilnya adalah sebagai berikut: (a) Urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 khususnya Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa urusan perhubungan menjadi urusan pemerintah provinsi. Kemudian pengaturan tentang urusan jalan umum dan khusus di bidang pertambangan batubara telah diatur pada PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu Provinsi Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan dalam Provinsi Jambi. Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan. (b) Bahwa Peraturan-peraturan kebijakan merupakan produk hukum yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan pejabat administrasi negara kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum (berlaku sama bagi setiap warga negara). Produk hukum dalam pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, yang kemudian di Provinsi Jambi ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi dan pengaturan tentang penyelenggaraan jalan khusus.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Jalan Umum dan Jalan Khusus, Angkutan Tambang.

Regional Government Policy in Utilizing Public Road Infrastructure for Mineral and Coal Mining Companies in Jambi Province

ABSTRACT

This thesis research was motivated by quite a lot of news on various social media regarding traffic jams caused by coal transportation in Jambi Province which resulted in fatalities, this was caused by the increasing daily traffic load on public roads. These problems have attracted the attention of the government, both the central government and regional governments, especially the Jambi Provincial Government, namely congestion on highways, damage to public roads and the need for special roads for transporting coal. Coal transportation should be via special roads, not national roads. However, Jambi currently does not have this special road. So coal trucks still use public roads. Based on this background, it is necessary to examine (a) the authority of regional governments in regulating the obligations of coal mining companies regarding public and special road infrastructure in Jambi Province, (b) Regional Government policies and legal consequences in utilizing public and special roads related to mineral and coal mining transportatio. By using normative juridical research methods, the norms governing the management of natural resources, especially mineral and coal mining, the results are as follows: (a) Government affairs in the field of transportation and transportation which are the authority of the regional government are as regulated in Article 12, especially Article 12 paragraph (2) letter i of Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which determines that transportation matters are the business of the provincial government. Then the regulations regarding general and special road matters in the coal mining sector have been regulated in PP Number 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities. Apart from that, Jambi Province has also issued Jambi Province Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Regulations in Jambi Province. This regional regulation was established to regulate matters relating to the use of certain public roads and river routes in transporting coal which is deemed to provide solutions to problems that arise with the high intensity of coal transport in a fair manner. b) That policy regulations are free legal products stipulated by state administration officials in the context of carrying out government tasks. The policies of state administration officials are then outlined in a certain format so that they can be applied generally (apply equally to every citizen). Legal products regarding the use of public roads and special roads are stipulated in the Minister of Public Works Regulation Number 20/PRT/M/2011 concerning guidelines for the utilization and use of road parts, which then in Jambi Province regional regulations are stipulated which regulate the transportation of coal within Jambi Province and regulations regarding the operation of special roads.

Keywords: Government Policy, Public Roads and Special Roads, Mining Transport.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah S.W.T berkat rahmat-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Tesis yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Jalan Umum Terhadap Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jambi”**. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang akhlak dan budi pekertinya menuju peradaban kearah yang lebih baik, berkat perjuangan beliau sampai detik ini kita masih dapat menikmati manisnya Iman dan Islam. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Dalam penyelesaian penelitian dan penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu atas segala bantuan yang telah diberikan tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Sukanto Satoto, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama (I) dan Dr. Raden Sarwani, S.H., M.PA selaku Pembimbing pembantu (II), penulis mengucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan waktu yang diberikan dalam membimbing dan memberikan arahan, saran serta nasehat yang berharga selama proses penulisan Tesis ini.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi dan penyelesaian tesis ini, khususnya kepada;

1. Prof. Drs. H. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. H. Usman, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sekaligus Dosen Pengajar yang telah memberikan motivasi secara tulus dan ikhlas dalam mengarahkan bimbingan sehingga sampai pada persetujuan judul Proposal Tesis ini dan juga telah bekerja keras meningkatkan kualitas program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.
4. Hj. Andi Najemi, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan administrasi kepada penulis dan telah memberikan petunjuk selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.

6. Seluruh Tenaga Kependidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu mempermudah dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
7. Teristimewa untuk orang tua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini
8. Rekan-rekan seangkatan pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, terkhusus teman-teman Hukum Pemerintahan yang telah memberikan dukungan do'a dan semangat.
9. Sahabat-sahabatku dan semua pihak terkhusus yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian Proposal Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Proposal Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca terutama mahasiswa/i Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Jambi, Maret 2025

Novy Ekacitra
NIM. P2B123068

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	o
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Landasan Teoretis	20
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA, INFRASTRUKTUR JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS	42
A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam	42
B. Kewenangan Perizinan Perusahaan Tambang Mineral dan Batu Bara	52
C. Infrastruktur Jalan Umum dan Jalan Khusus	58
1. Pemanfaatan Jalan Negara sebagai Alternatif Pengelolaan di Luar Penggunaan/Peruntukan	65
2. Pemanfaatan Jalan Sebagai Perwujudan Keadilan Sosial .	66
3. Variasi Penyalahgunaan Jalan Umum	67
4. Perbandingan Pemanfaatan Jalan untuk transportasi di Daerah lain	68

BAB III	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATUR KEWAJIBAN PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA TERKAIT INFRASTRUKTUR JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI PROVINSI JAMBI	72
	A. Pengaturan Kewenangan dan Sumber Kewenangan	72
	B. Pengaturan Kewenangan Gubernur (Kepala Daerah) Terhadap Pengelolaan Transportasi Tambang Mineral Dan Batu Bara	81
	C. Otonomi Daerah dan Kewenangan Pengaturan Terhadap Kewajiban Perusahaan Tambang Batu bara Terkait Infrastruktur Jalan Umum Dan Khusus Di Provinsi Jambi	87
BAB IV	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN AKIBAT HUKUM DALAM MEMANFAATKAN JALAN UMUM DAN KHUSUS TERKAIT TRANSPORTASI TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA	104
	A. Kebijakan Pemerintah	104
	B. Eksistensi Peraturan Daerah Sebagai Kebijakan Pemerintah Daerah	109
	C. Akibat Hukum Terhadap Pemanfaatan Jalan Umum Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara	116
BAB V	PENUTUP	133
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran	135
	DAFTAR PUSTAKA	137